

TANTANGAN MODERASI ISLAM DI BUMI INDONESIA KONTEMPORER

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA

Rektor UIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep Moderasi Islam sebagai *ijtihad* membangun peradaban Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Keberkahan bumi Indonesia dengan beragam Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) secara sosial budaya menjadi fenomena sosial kontemporer yang menarik untuk dikaji, serta menjadi tantangan bagi semua komponen bangsa dalam mempertahankan keutuhan nasional. Pertanyaan yang dirumuskan dalam artikel ini yaitu: *Apa dan bagaimana konsep moderasi Islam secara riil dapat mewujudkan interaksi sosial antar pemeluk agama yang berkeadilan di Indonesia?* Kajian ini menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi aktualisasi moderasi Islam di Indonesia, yaitu: kebebasan dan toleransi. Secara spesifik, isu kebebasan beragama di Indonesia merupakan wilayah yang sensitive dan dampaknya sering menghambat kerukunan (tidak ada toleransi) antar individu/kelompok dan komunitas. Toleransi antar umat beragama di Indonesia merupakan cara agar kebebasan itu hidup dan berkembang harmonis, yang keduanya tidak dapat diabaikan dalam mengaktualisasikan konsep *tawassuth*. Keduanya sepatutnya berjalan dalam konteks *wasathiyah* untuk menciptakan keadilan sosial dan bukan sebagai alat penekanan/penjinakan bahwa kebebasan yang berlebihan akan mengabaikan toleransi dan memaksakan toleransi sebagai upaya merukunkan dengan cara membelenggu kebebasan. Untuk itu, pemahaman yang utuh memaknai kebebasan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia saat ini merupakan tantangan moderasi Islam dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: *Toleransi, kebebasan, tawassuth, keadilan sosial.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang begitu kompleks. Negara Indonesia ini telah dikaruniai sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,64 juta jiwa, dan di tahun 2018 mencapai 270,05 juta jiwa yang tersebar dari

Sabang sampai Merauke serta dari dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga negara ini masuk dalam negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Negeri yang kaya dan besar ini merupakan aset bangsa yang terus dijaga sebagai wujud nilai makna Islam *رحمة للعالمين* dengan melakukan berbagai upaya menjaga kerukunan SARA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri dan elit bangsa Indonesia, meyakini bahwa sebagai negara yang besar merupakan anugerah Allah SWT kepada negeri ini agar selalu memperoleh keberkahan-Nya¹ menjadi negara *بلدة طيبة ورب غفور* sejalan dengan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kontekstasi negara yang besar, Indonesia memperoleh kelebihan untuk selalu memupuk dan mejaga sikap menjadi bangsa dengan penuh kearifan, karena masyarakat multi budaya ini sangat rentan dengan konflik sosial. Jika realitas sosial SARA tidak dijaga dengan utuh dengan rapih dan rukun, sudah tentu akan terbuka lebar peluang kehancuran dan perpecahan di level warga komunitas SARA tersebut². Negeri ini memiliki tantangan yang besar ketika perbedaan SARA itu membutuhkan upaya solutif agar tiap-tiap warga negara dapat hidup aman dan damai. Hal ini sudah menjadi komitmen seluruh komponen bangsa, khususnya tokoh agama islam dimana memiliki perhatian dalam mengimplementasikan hukum Islam di level masyarakat, sebab hukum Islam itu dilandasi oleh semangat membangun kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana para Walisongo membangun peradaban Islam yang memperoleh simpati dari masyarakat Nusantara.

¹ Negeri Saba' dilukiskan dengan *baldahtayyibah wa Rabb Gafūr*. Menurut kata tayyib berarti baik dan menyenangkan. Negeri yang baik antara lain adalah yang aman dan sentosa, melimpah reskinya, yang dapat diperoleh secara mudah oleh penduduknya serta terjalin pula hubungan harmonis, kesatuan dan persatuan antar anggota masyarakatnya. Lihat: Dumair, *Negeri Saba' dalam al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS Saba'/34 :15-17)*, 2016: 24

² Kontekstasi keberagaman di Nusantara yang kerap kali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok yang lain yang mana di antaranya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Lihat: Darlis, *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*, 2017: 226.

Berbicara peran para Walisongo dalam menyebarkan nilai-nilai Islam sejalan tuntunan al-Qur'an dan Hadis sebagai pedomannya di tengah kondisi sosial budaya masyarakat nusantara yang mayoritas menganut agama Hindu-Budha bahkan aliran kepercayaan. Untuk itu, sikap dakwah yang diterapkan oleh para Walisongo merupakan pangkal tolak nilai-nilai islam mengalami dinamisasi di tengah-tengah masyarakat multi budaya. Pilihan para Walisongo yaitu menerapkan konsep *tawassuth* dalam melakukan dakwah Islam, atau sering diistilahkan dengan moderat, sehingga gerakannya disebut *wasathiyah*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat QS al-Baqarah/2: 143 berikut ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahannya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu³.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jelas firman Allah SWT menyatakan karakter Islam diungkapkan dengan kata *وَسَطًا* yang artinya pertengahan atau moderat. Makna ini dalam hal bertindak (الاعمال) dalam segala aktivitas kehidupan, seperti: tindakan, pikiran, dan ucapan. Untuk itu, penerapan dakwah yang ideal sejalan dengan tuntunan al-Qur'an perlu dirumuskan dan dibangun sesuai dengan prinsip nilai dengan mengutamakan perhatian terhadap kearifan lokal masyarakat, yang dilakukan melalui metode yang ramah, santun dan menghindari perilaku kekerasan⁴, namun juga menerapkan ketegasan sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

³ Lihat: Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Kementerian Agama RI, terjemahan Al-Baqarah (2)-Ayat 143*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/143>

⁴ Ahmad Hasyim Muzadi, gerakan Islam garis keras yang berkembang selama ini -seperti kaum radikal ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Wahabi dan Syiah yang mengusung pemberlakuan hukum Islam dengan cara-cara kekerasan harus disikapi dengan serius dan dilawan dengan paham moderasi hukum Islam. Lihat: Moh. Dahlan, *Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi*, 2018: 314

Pluralitas agama bangsa Indonesia merupakan fenomena sosial yang unik. Hardaniwarya dalam Ismardi & Arisman (2014: 201) menyebut ada masa orde baru, diakui secara *de jure* bahwa terdapat 5 (lima) agama dan lebih dari seratus aliran kepercayaan. Realitasnya, penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dihadapi kenyataan pluralitas agama⁵. Dengan demikian, kondisi ini tidak dapat disangkal sebagai salah satu bangsa yang hidup dalam pluralitas.

Atas penjelasan tersebut, moderasi Islam di Indonesia pada era kontemporer ini yang hendak dikaji oleh penulis. Kenapa hal ini penting? Sebab, persoalan yang muncul akibat isu-isu keagamaan pada masyarakat Indonesia yang majemuk, hanya bisa ditangani melalui metode penyelesaian yang komprehensif, bukan dengan cara-cara pemaksaan dan kekerasan yang dampaknya akan merusak tatanan sosial yang lebih luas.

Rangkaian kasus-kasus kebebasan beragama yang berdampak pada konflik sosial di Indonesia menunjukkan bahwa negara belum mampu memiliki pola pemahaman yang utuh dalam menciptakan keharmonisan di level komunitas antar pemeluk agama yang saling berkonflik. Kasus penyerangan terhadap jama'ah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat⁶, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan realitas sosial yang dihadapi oleh bangsa. Begitu juga dengan penolakan pendirian gereja di Banten⁷ & Jawa Barat sebagai pemicu kerenggangan sosial antar warga yang berbeda agama di wilayah tersebut. Nampaknya kebebasan dan toleransi

⁵ Penduduk Indonesia memiliki pluralitas agama. Dalam bertetangga, di sekolah dan tempat kerja akan berinteraksi dengan orang yang beda agama. Lihat: Ismardi & Arisman, *Meredam Konflik dalam Upaya Harmonisasi antar Umat Beragama*, 2014: 201

⁶ Penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi di Pulau Lombok pada Sabtu dan Minggu, 19-20 Mei 2018. Kali ini sebanyak 24 jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Sakra, Lombok Timur akhirnya mengungsi ke Mapolres Lombok Timur setelah rumah mereka diduga dirusak oleh sekelompok masyarakat. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/3533499/kasus-ahmadiyah-komnas-ham-minta-pemprov-ntb-belajar-ke-wonosobo/>

⁷ Aksi protes keras yang disampaikan terus berdatangan dari tokoh muda dan tokoh ulama, berawal dari informasi yang berkembang cepat melalui medsos mengenai keberadaan Gereja di wilayah Lembang-Citangkil Kota Cilegon, yang menurut beberapa sumber adalah keberadaannya illegal dan dianggap telah meresahkan masyarakat secara umum di kota Cilegon. Diakses dari: <http://www.seputarbanten.com/2017/07/penolakan-masyarakat-kota-cilegon.html>

beragama di Indonesia mengalami dewasa ini menjadi isu yang sensitif yang menimbulkan gejolak perpecahan di masyarakat.

Fenomena sosial tersebut perlu menjadi perhatian tokoh bangsa dan pemuka agama bahkan para cendekiawan dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam *رحمة للعالمين* demi kepentingan untuk membendung arus konflik yang lebih luas bermotif agama. Secara historis, Indonesia sudah memiliki pola penyebaran Islam yang dilakukan oleh para Walisongo⁸ yang dilakukan dengan mengedepankan rasa perdamaian, saling rukun dan harmonis antar pemeluk agama, serta menguatkan kebersamaan yang bertumpu saling menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama, yaitu: Islam, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Sehingga Islam sebagai agama dan segala nilai ajarannya, bisa mewujud dan terinternalisasi dalam menciptakan interaksi sosial yang kuat antar warga di Nusantara.

Dengan demikian, moderasi Islam perlu dirumuskan oleh berbagai kalangan di negeri ini sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diupayakan menemukan formulasi solusinya dengan baik dan benar. Sebab, Indonesia di era ini secara ekonomi politik menjadi salah satu perhatian dunia internasional sebagai pusat rujukan bernegara dalam masyarakat yang majemuk (plural). Pondasi bernegara dengan semangat *Bhineka Tunggal Ika* merupakan semboyan yang sesungguhnya perlu diinternalisasikan untuk menciptakan interaksi sosial dalam bentuk asosiatif⁹, yaitu: semangat kerjasama, gotong royong, tolong menolong antar sesama pemeluk agama. Konsep interaksi sosial menjadi bagian penting sebagai katalisator penguatan moderasi beragama di Indonesia, sebab menurut Bales 1954: 1 menyebut *social interaction is largely made up of the talking that people do when they get together.*

⁸ Syiar Islam yang dilakukan oleh para Walisongo merupakan cara-cara persuasif yang dikembangkan dalam mengislamkan pulau Jawa dan menggantikan kekuatan Hindu- Budha pada abad XVI dan XVII. Lihat: Faiqah & Pransiska, *Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai*, 2018: 53

⁹ Bentuk interaksi sosial salah satunya, yaitu Asosiatif terdiri dari: kerjasama (cooperation), asimilasi, dan akomodasi (accommodation). Lihat: Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2006: 64

Dalam artikel ini, penulis akan menjawab konsep moderasi Islam secara *riil* dapat mewujudkan interaksi sosial antar pemeluk agama yang berkeadilan di Indonesia sebagai solusi di tengah masyarakat multikultural. Melalui pendekatan interaksi sosial dalam teori sosiologi yang dilakukan dengan melakukan penelusuran dari berbagai literatur sosial keagamaan dan keislaman yang berhubungan dengan fenomena gerakan *wasathiyah* di Indonesia.

B. Pembahasan

Interaksi sosial antar umat beragama merupakan hubungan sosial yang dinamis, didalamnya banyak menyangkut hubungan sosial, baik antar individu, kelompok, dan komunitas dalam masyarakat yang lebih luas. Yulianti (2003: 91) menjelaskan bahwa interaksi sosial itu terjadi apabila ada dua orang/kelompok yang saling bertemu satu sama lain dan dalam pertemuan tersebut mereka saling komunikasi. Interaksi yang terjadi bisa berbentuk asosiatif maupun disosiatif, tergantung dari kepentingan kedua belah pihak yang saling berinteraksi.

Di Indonesia, dalam konteks sosial budaya yang memiliki ciri khas adat istiadat “ketimuran,” interaksi sosial sebagai kunci dari berbagai dinamika sosial yang melekat dalam kehidupannya. Interaksi antar pemeluk agama merupakan realitas sosial yang terjadi di lingkungan warga, baik di level Rukun Tetangga (RT) hingga nasional. Realitas itu menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia memiliki tujuan bersama, yaitu menjadi bagian dari manusia yang saling memberikan manfaat antar sesama dalam wadah membangun kehidupan sosial secara bersama-sama. Dalam konteks ini, Ahmadi (2004: 100) menyebut maksud interaksi sosial pada dasarnya berpengaruh terhadap hubungan timbal balik dari upaya para pihak dalam memecahkan berbagai isu sosial sesuai tujuan yang diharapkan.

Interaksi sosial antar pemeluk agama di Indonesia merupakan hubungan manusia yang bermakna. Hubungan yang terjalin itu terjadi *feed back* (timbal balik) dan terjadi kontak makna antar pemeluk agama dalam

menjalin hubungan yang baik antar mereka. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Terjemahannya:

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain¹⁰.

Jelas bahwa makna kebaikan dalam komunikasi yang dilakukan antar pemeluk agama merupakan simbol yang terbentuk antar sesama mereka. Dari interaksi itu akan timbul rasa senang, bahagia¹¹ dan simpati antar sesama dan diungkapkan dalam bentuk senyum, saling berjabat tangan, tolong menolong serta tindakan positif dan konstruktif lainnya sebagai respon pengertian penuh dalam hubungan sosial mereka.

Interaksi sosial antar pemeluk agama dalam hubungan simbiosis mutualisme menunjukkan bahwa keadilan sosial antar mereka telah mewujudkan dalam sikap dan tindakan sosialnya. Dalam ajaran Islam telah diberikan pedoman bagi pemeluknya, bahwa berlaku adil dalam segala aktivitas dunia merupakan nilai luhur yang wajib diamalkan dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat QS al-Maidah/5: 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

¹⁰ HR. Ath-Thabari dalam al-Mu'jam al-Awsath VI/58. Syaikh al-Albani menyatakan hasan dalam ash-Shahihah no. 426.

¹¹ Dalam kehidupan manusia, kebahagiaan dianggap sebagai tujuan utama, walaupun kebahagiaan sebagai konsep yang abstrak dan sulit dimengerti oleh rasionalitas manusia itu sendiri. Hasil penelitian tentang hubungan religiolitas dengan kebahagiaan, menemukan bahwa semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula kebahagiaan individu. Lihat: *Ardy, Peran Moderasi Ideologi Politik terhadap Hubungan antara Religiusitas dan Kebahagiaan*, 2018: 23

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan¹².

Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap umat Islam wajib berlaku adil antar sesama manusia. Interaksi sosial yang dibangun oleh umat Islam dengan umat beragama dan keyakinan lainnya perlu mengedepankan sikap kemanusiaan dan bisa menjadi “penengah” dalam menghadapi munculnya isu-isu sosial keagamaan serta berkontribusi dalam menyelesaikannya secara adil dan bijaksana. Posisi inilah yang sesungguhnya menunjukkan wajah Islam moderat, yaitu menyiarkan ajaran Islam melalui cara-cara yang lemah lembut dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Azra dalam Abdurrohman (2018: 2) menyebut juga bahwa Islam moderat di Nusantara merupakan karakter asli dari pluralitas Muslim di Indonesia. Jadi, moderasi Islam di Indonesia sudah sangat melekat dengan kondisi sosial budaya lokal, syiar Islam bisa diterima oleh semua kalangan karena tidak memberikan pengekangan terhadap pemeluknya maupun pemeluk agama lain.

Dewasa ini, dalam konteks Indonesia, Kyai Hasyim Muzadi menyatakan saat ini muncul penilaian-penilaian subjektif dari salah satu kalangan umat Islam yang dengan mudah menyudutkan bahwa umat Islam di Indonesia telah melanggar batas *aqidah* (Dahlan, 2014: 318). Kondisi ini merupakan fenomena sosial, yang realitasnya sudah menjadi gerakan nyata di Indonesia yang menganggap bahwa ajaran Islam di Indonesia yang telah terinternalisasi dengan budaya nusantara disebut *bid'ah*. Gerakan itu bukan menysar pada umat Islam saja, melainkan juga umat agama lain dan aliran kepercayaan, sehingga muncul istilah gerakan *takfīrī* (pengkafiran) yang menyebut bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan *aqidah* Islam menurut pihak mereka adalah menyimpang dari ajaran Islam.

¹² Lihat: Kementerian Agama RI, al-Qur'an Kementerian Agama RI, terjemahan Al-Maidah (5)-Ayat 8, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/5/8>

Gerakan *takfirī* saat ini sudah masuk ke Indonesia dengan menyebarkan ajaran hukum Islam melalui cara-cara yang berbeda dengan gerakan dakwah para Walisongo. Aksi radikalisme yang muncul di negeri ini merupakan wujud dari gerakan perlawanan ideologi dan politik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menurut pemahaman mereka, yang menimbulkan berbagai rangkaian aksi terror, salah satunya gelombang kasus bom bunuh diri hingga menimbulkan banyak korban, baik umat Islam maupun umat agama lainnya. Syafar (2018: 103) menyebut aksi radikalisme di Indonesia yang sebagai suatu sikap yang menginginkan perubahan terhadap nilai-nilai yang melekat ada di masyarakat secara drastis melalui tindakan/aksi yang ekstrem. Sasaran gerakan terorisme yang cukup radikal saat ini perlahan mulai mengalami pergeseran, yaitu: fasilitas pemerintahan/negara dan aparat kepolisian.

Sebenarnya, tindakan teror tidak hanya terjadi pada rangkaian aksi bom bunuh diri, melainkan juga pada aksi kekerasan pada kelompok minoritas agama. Rangkaian aksi yang sering terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia yaitu: kasus kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah & penolakan pembangunan gereja. Pada tahun 2018, di Jawa Barat & Nusa Tenggara Barat (NTB) penolakan dan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi. Di NTB, sebanyak 24 jemaah Ahmadiyah di akhirnya mengungsi di kantor polisi setelah rumah mereka diduga dirusak oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan di Jawa Barat, massa umat Islam melakukan aksi unjuk rasa di depan Masjid Ahmadiyah dan menuntut dibubarkan¹³. Begitu juga dengan kasus penolakan terhadap pembangunan gereja, salah satunya di Jawa Barat & Banten¹⁴. Masa Umat Islam melakukan aksi unjuk rasa dengan menolak pembangunan gereja di wilayahnya, dimana mayoritas pemeluknya adalah warga Muslim yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan ibadah.

¹³ Komnas HAM sendiri mengutuk keras peristiwa itu karena dianggap sebagai bentuk penyerangan langsung terhadap kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/3533499/kasus-ahmadiyah-komnas-ham-minta-pemprov-ntb-belajar-ke-wonosobo>

¹⁴ Keberadaan gereja yang dibangun itu dianggap warga sekitar telah meresahkan. Diakses dari: <http://www.seputarbanten.com/2017/07/penolakan-masyarakat-kota-cilegon.html>.

Ahmadiyah dan umat kristiani merupakan pemeluk minoritas yang ada di negeri ini. Jika membaca kasus di atas, bahwa tindakan kekerasan atas nama agama tersebut dilakukan karena Ahmadiyah dan pembangunan gereja dianggap telah mengganggu dan bahkan menodai keyakinan yang dipegang teguh oleh mayoritas, sehingga kecil kemungkinan hak-hak minoritas untuk bisa diterima yang pada akhirnya Ahmadiyah harus dibubarkan¹⁵, sedangkan pembangunan gereja harus ditolak¹⁶. Kondisi harus dihadapi oleh para korban, walaupun mereka menghadapi kenyataan bahwa selaku minoritas harus mengakui kekuatan mayoritas.

Kasus di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang Islam di Indonesia nampaknya menghadapi tantangan yang begitu kuat, khususnya terkait kebebasan dan toleransi beragama. Di tengah dinamika politik dunia, pluralisme/kemajemukan di Indonesia semakin diuji terhadap pilihan sebagai Negara yang menganut demokrasi. Setiap warga Negara memiliki kebebasan untuk menentukan sikap, baik secara sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana interaksi antar pemeluk agama menimbulkan kerenggangan satu sama lain, yang secara sosial mengganggu keutuhan nasional.

Jika melihat kemajuan masyarakat Madinah, yang di dalamnya terdapat keragaman masyarakat dalam *aqidah*, *tabi'at* serta budaya, tidak menjadi halangan antar pemeluk agama menjaga dan membina keutuhan *ukhuwah* dan toleransi beragama. Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin

¹⁵ Ada beberapa logika yang menjadi dasar kebijakan pemerintah kepada Ahmadiyah itu. Pertama, Ahmadiyah merupakan minoritas, Ahmadiyah dianggap telah menodai keyakinan yang telah lama dipegang oleh kelompok Islam lain yang lebih besar dan mayoritas. Oleh karena itu, solusinya, Ahmadiyah dibubarkan dan anggotanya diharuskan bertaubat serta memeluk keyakinan sebagaimana diikuti kelompok mayoritas. Atau, kalau tidak, Ahmadiyah diharuskan membentuk agama tersendiri. Kedua, Ahmadiyah telah dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat. Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan malah dianggap sebagai provokator yang memicu agresi. Ahmadiyah adalah pengganggu kedamaian umat Islam. Oleh karena itu, solusinya, warga Ahmadiyah dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Lihat: Mundzir, *Negara, Hak-hak Minoritas, dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)*, 2012: 184-185

¹⁶ Massa yang menolak pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi, mengungkapkan alasan mereka menolak pembangunan gereja tersebut. Alasannya karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>

kaum muslimin menjaga keutuhan Madinah dengan menjamin kemerdekaan penduduk menjalankan kehidupannya dengan damai¹⁷. Sebab Nabi Muhammad SAW berpedoman dengan petunjuk dari Allah SWT, bahwa kepemimpinan beliau dan ajaran Islam yang disyiarkan memiliki nilai rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat QS al-Anbiya/21: 107 berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam¹⁸.

Jika memahami ayat di atas, Negara Indonesia perlu menjadikan negeri Madinah sebagai teladan untuk bisa diikuti pola pengelolaannya. Dimana hak-hak minoritas dijamin kebebasannya, namun juga mengutamakan toleransi antar umat beragama. Dari berbagai kasus kekerasan atas nama agama tersebut di atas, kehadiran Negara sangat diperlukan untuk menjaga *ukhuwah* di masyarakat. Para pelaku kekerasan dan korban perlu dipertemukan untuk mencapai titik temu dalam persoalan yang mereka hadapi, yang mungkin dari hasil dialog tersebut muncul kesepakatan yang bisa menciptakan kerukunan antar mereka.

Para tokoh agama nusantara, baik dari kalangan Nahdatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah memandang bahwa hukum Islam itu memberikan garansi terwujudnya tata kehidupan umat Islam yang damai dan harmoni karena aktualisasi nilai-nilai Islam disebarkan dengan “jalan damai” yang berlandaskan kajian-kajian hukum Islam yang *kaffah*. Moderasi Islam

¹⁷ Nabi Muhammad membangun negara dan masyarakat madinah atas dasar kontrak sosial politik. Bukan pemaksaan kehendak dan kekerasan. Negara dan masyarakat madinah adalah negara republik dengan warga negaranya yang heterogen. Karena itu nabi menjalankan prinsip-prinsip kenegaraan ‘demokratis’ berdasarkan tuntunan Allah swt (musyawarah, persamaan, keadilan sosial, kemerdekaan HAM, pertanggung jawaban pemimpin). Lihat: Syam, *Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi*, 2018: 202

¹⁸ Lihat: Kementerian Agama RI, al-Qur’an Kementerian Agama RI, terjemahan al-Anbiya (21)-Ayat 107, diakses dari: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/21/107>

merupakan sikap utama bagi umat Islam memperteguh kebijaksanaannya membangun masyarakat madani. Peran pesantren juga sangat penting dalam mensyiarkan moderasi Islam, sebab pesantren sebagai lembaga yang sudah mengakar dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia¹⁹.

Konsep moderasi Islam yang dilakukan Muhammadiyah dan NU merupakan aktualisasi kiprahnya dalam mewarnai dunia pemikiran Islam sebagai bentuk membendung munculnya pemahaman radikal Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Dalam artikelnya, Hilmy (2013: 28) menyebut bahwa moderasi Islam dalam konteks Indonesia, setidaknya ada 5 (lima) karakteristik, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Regardless the above controversy, the concept of moderatism in the context of Indonesian Islam has at least the following characteristics; 1) non-violent ideology in propagating Islam; 2) adopting the modern way of life with its all derivatives, including science and technology, democracy, human rights and the like; 3) the use of rational way of thinking; 4) contextual approach in understanding Islam, and; 5) the use of ijtihad (intellectual exercises to make a legal opinion in case of the absence of explicit justification from the Qur'an and Hadith). Those characteristics are, however, can be expanded into several more characteristics such as tolerance, harmony and cooperation among different religious groups.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa moderasi Islam merupakan sikap anti kekerasan dalam mensyiarkan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta peran syiar para Walisongo yang hingga kini dijalankan oleh pemuka agama NU dan Muhammadiyah. Islam menjamin kemerdekaan setiap individu untuk

¹⁹ Peran Pesantren As'adiyah di Sengkang dalam membangun moderasi Islam di tanah Bugis sangat penting, yang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: peran alumni yang pernah belajar di pesantren mensyiarkan Islam kepada masyarakat, dan pendidikan pesantren yang memiliki paham *ahlussunnah wal jama'ah* dengan mengedepankan prinsip *tawassuth*, *tasamuh* dan *tawazun*. Lihat: Darlis, *Peran Pesantren As'adiyah Sengkang dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis (Sebuah Penelitian Awal)*, 2016: 111

menjalani kehidupannya, baik muslim maupun non muslim dengan mengedepankan toleransi antar sesama. Jika ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam memaknai hukum Islam, maka perlu disikapi dengan arif. Keragaman hanya bisa disikapi dengan kebesaran jiwa dan membuka dialog antar sesama. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia akan selalu diuji dengan berbagai isu kerukunan kehidupan umat beragama. Untuk itu, moderasi Islam bukan hanya sekedar untuk memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama melakukan tindakan sosial sesuai kehendaknya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang melekat di masyarakat tersebut. Pada akhirnya toleransi hanya dianggap sebagai “obat mujarab” untuk mengatasi permasalahan sosial akibat kebebasan tanpa batas tersebut.

Kebebasan dan toleransi harus dimaknai seutuhnya oleh warga Negara, termasuk antar pemeluk agama di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan atas nama agama sebagaimana diuraikan di atas, akan bisa diatasi oleh bangsa ini dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, bahwa Negara menjamin kehidupan warganya dengan Pancasila sebagai falsafahnya. Penolakan pembangunan gereja yang sering terjadi bisa diatasi ketika Negara hadir untuk membantu kerukunan pemeluk antar agama yang sedang berselisih tersebut²⁰. Begitu juga dengan kasus pengusiran warga Ahmadiyah di berbagai daerah, dimana tidak akan terjadi jika semua pihak mengedepankan toleransi dalam membangun interaksi sosial yang positif antar sesama dengan dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat²¹.

²⁰ PUSAD Yayasan Paramadina mencatat ada 3 (tiga) faktor penting dalam keberhasilan pembangunan gereja di Indonesia, yaitu: *pertama*, adalah dukungan dari pemerintah setempat dan kepolisian. Mereka memiliki wewenang untuk menerima atau menolak pengajuan izin pendirian gereja dan menghentikan massa yang ingin mengganggu proses pembangunan gereja. *Kedua*, adalah dukungan dari tokoh agama setempat. Pendekatan ini menciptakan hubungan baik dan mengubah sikap tokoh ini untuk mendukung pendirian gereja tersebut. *Ketiga*, keberhasilan dialog dengan masyarakat Muslim di daerah sekitar untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menegaskan bahwa gereja tersebut tidaklah dibangun untuk memfasilitasi kristenisasi terhadap umat Muslim, tetapi untuk digunakan oleh anggota gereja saja. Diakses dari: <http://www.paramadina-pusad.or.id/faktor-penting-keberhasilan-pendirian-gereja-di-indonesia/> pada 5 Juli 2019.

²¹ The Jakarta Post merilis berita: *Ahmadi, Sunni Muslims live in peace in Wonosobo*. Dalam laporannya dituliskan: *The local administration has also been supportive of the Ahmadi. The previous regent, for example, initiated regular interfaith meetings*. Diakses dari: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/15/ahmadi-sunni-muslims-live-peace-wonosobo-java.html> pada 5 Juli 2019.

Untuk itu, Moderasi Islam di Indonesia bukanlah dimaknai sebagai paradigma untuk “menjinakkan/penekanan” interaksi sosial antar pemeluk agama, namun sebagai penguat “kesalihan sosial” antar pemeluk agama itu sendiri. Dalam memahami dan mengaktualisasikan moderasi Islam, tidak ada yang peran yang dominan dari yang pemeluk agama mayoritas menekan/menjinakkan yang minoritas. Serta atas nama demokrasi, pemeluk agama minoritas mencoba menekan/menjinakkan yang mayoritas dengan “jargon” kebebasan tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Dengan demikian, sikap toleran merupakan bentuk dari “kesalihan sosial” antar pemeluk agama mewujudkan kerukunan yang sejalan dengan Pancasila. Sehingga setiap pemeluk agama akan menjiwai kehadiran Negara Indonesia sebagai negeri yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana diuraikan diatas, penulis meyakini bahwa Indonesia sedang mengalami isu sosial yang begitu menantang bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kontemporer, yaitu: kerukunan antar umat beragama. Islam sebagai agama yang tidak diragukan kesempurnaannya, telah memiliki pedoman hidup bagi para pemeluknya untuk selalu mencapai insan yang bertaqwa, yaitu: menjalankan perintah Allah SWT serta meninggalkan segala yang dilarangnya, dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis .

Islam sebagai agama yang mayoritas pemeluknya di Indonesia, maka sepatutnya menjadi teladan bagi umat agama lain dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, untuk memberikan semangat kebangsaan melalui moderasi Islam. Konsep ini bukan sesuatu yang baru, Nabi Muhammad SAW, bahkan para Walisongo yang mensyiarkan Islam di bumi nusantara telah mengaktualisasikannya untuk menjalankan perintah Allah SWT, Sang Pemilik alam semesta. Namun konsep ini, telah menjadi menantang di era Indonesia kontemporer ini, terutama dalam merawat kebhinekaan.

Realitasnya, paradigma moderasi Islam bisa menuntun pada tokoh agama di Indonesia membangun masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, serta para Walisongo di Nusantara. Untuk membangun Indonesia yang utuh sesuai dengan Pancasila, maka Moderasi Islam tidak hanya dipahami sebagai sikap yang toleran terhadap kebebasan beragama bagi para pemeluknya, namun kebebasan dan toleransi itu dimaknai untuk menumbuhkan nilai kerukunan dalam kerangka kemajemukan Indonesia. Masing-masing pemeluk agama mendepankan sikap kebersamaan daripada memaksakan kehendak untuk kepentingan golongannya. Dengan demikian, interaksi sosial antar pemeluk agama akan memperteguh semangat persatuan dengan menanggalkan sikap perselisihan yang akan merugikan kemajuan bangsa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep. 2018. "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam." *Rausyan Fikr* 14(1):29–41.
- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardhy, Ais Nur. 2018. "Peran Moderasi Ideologi Politik Terhadap Hubungan Antara Religiositas Dan Kebahagiaan." *Jurnal Psikologi Sosial* 16(1):23–33.
- Bales, Robert F. 1954. *Social Interaction*. 2nd Draft. P-587. Santa Monica, USA: The Rand Corporation.
- Dahlan, Moh. 2018. "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11(2):313.
- Darlis. 2017. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr* 13(2):225–55.
- Darlis, Darlis. 2016. "Peran Pesantren As'adiyah Sengkang Dalam Membangun Moderasi Islam Di Tanah Bugis (Sebuah Penelitian Awal)." *Al-Misbah* 12(1):111–40.
- Dumair. 2016. "Negeri Saba' Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS Saba'/34 :15-17)." Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Faiqah, Nurul and Toni Pransiska. 2018. "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra* 17(1):33–60.
- Hilmy, Masdar. 2013. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam* 07(1):24–48.
- Ismardi & Arisman. 2014. "Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama." *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama* 6(2):200–222.
- Kementerian Agama RI. n.d. "Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia." Retrieved April 6, 2019 (<https://quran.kemenag.go.id/>).
- Mundzir, Ilham. 2012. "Negara, Hak-Hak Minoritas, Dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)." *INDO-ISLAMIKA* 1(2):183–95.
- PUSAD Paramadina. 2012. "Faktor Penting Keberhasilan Pendirian Gereja Di Indonesia."
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafar, Muhammad. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten." *Lembaran Masyarakat* 4(2):103–22.
- Syam, M. Basyir. 2018. "Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Aqidah-Ta* IV(2):198–213.
- Yulianti, Yayuk. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

